

**INTEGRASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH:
KAJIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/
KOTA MELALUI APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**HANDA ASHIDY
21040115410033**



**FAKULTAS TEKNIK
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

**INTEGRASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH:
KAJIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/
KOTA MELALUI APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh :

**HANDA ASHIDY
21040115410033**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 16 Februari 2017

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 16 Februari 2017

Tim Penguji:

Dr. Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS – Pembimbing :

Wido Prananing Tyas, ST, MDP, PhD – Penguji I :

Maya Damayanti, ST, MA, PhD – Penguji II :



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dr. Sc. Agr. Iwan Rudiarto, ST, MSc

ii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 12 Februari 2017



HANDA ASHIDY
NIM 21040115410033

“Sebuah tong yang penuh dengan pengetahuan belum tentu sama nilainya dengan setetes budi” (Phytagoras). Semoga bertambahnya pengetahuan saya dengan terselesaikannya studi ini diimbangi dengan bertambahnya budi pekerti saya dalam memanfaatkannya...

Dengan penuh rasa syukur, **tesis ini saya persembahkan untuk:**
mamah papah tercinta yang tidak putus-putusnya mendoakan ananda,
putri kecilku tersayang Kaylani Vanyafayza yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjadi panutan yang baik,
teman hidup yang rela berbagi keluh kesah dan meringankan beban penyelesaian studi ini,
kakak-kakakku yang dengan ikhlas mensupport keberhasilan adik kecilnya,
para pimpinan dan teman-teman Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran masukan serta berbagai bentuk dukungan lainnya,
teman-teman IT ULP yang tidak bosan memberikan pertolongan,
para staff dan teman-teman seperjuangan di MPWK Universitas Diponegoro
serta semua handai taulan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu...

“Matahari pun memiliki sinar yang redup saat pertama kali muncul di ufuk timur, namun semakin lama semakin kuat cahayanya seiring berjalannya hari” (Charles Dickens). Terima kasih pada kalian semua yang telah menjadi penguat cahayaku..semoga menjadi berkah dan amalan bagi kita semua..Aamiin.

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi merupakan salah satu upaya mewujudkan *good governance*, selain juga diperlukan dalam implementasi pengembangan wilayah. Melalui integrasi pembangunan, program/kegiatan dapat disusun dengan tepat serta dapat diimplementasikan dengan baik melalui integrasi antar kebijakan, serta dapat memenuhi harapan, baik harapan Pemerintah Provinsi maupun juga harapan masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota melalui integrasi hierarki spasial. Integrasi dari aspek hierarki spasial memiliki tantangan yang berbeda apabila dipandang dari penerapan otonomi daerah karena terdapat 35 Kepala Daerah dengan permasalahan daerah yang berbeda-beda. Salah satu alat mengintegrasikan pembangunan yaitu melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Terbatasnya kemampuan keuangan, mengakibatkan pengalokasiannya harus mempertimbangkan prioritas melalui proses Musrenbang. Meskipun demikian, selalu dijumpainya kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, mengindikasikan belum adanya sinkronisasi antara kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. Dari gambaran tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tingkat integrasi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota-nya melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis *desk analysis* dan diagram kuadran. Berdasarkan hasil analisis, tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana masih rendah, dipengaruhi oleh faktor kebijakan mengenai luncuran kegiatan, ketersediaan dana sharing, konsistensi penggunaan indikator perhitungan proporsionalitas keserasian, sumber usulan, proporsi usulan, jumlah dan kapasitas SDM, kebijakan pemerataan alokasi anggaran dan mekanisme penentuan kegiatan. Melihat temuan tersebut, faktor integrasi wilayah yang berkontribusi adalah sinkronisasi kebijakan (integrasi vertikal) dan implementasi kegiatan (integrasi horisontal). Sementara itu, faktor integrasi organisasional yang berkontribusi adalah waktu pelaksanaan serta alokasi anggaran (integrasi strategis, SDM yang memadai (integrasi operasional), koordinasi serta komunikasi dan saling pengertian (integrasi pemangku kepentingan), sedangkan faktor integrasi sektoral yang berkontribusi adalah keseimbangan kekuasaan antar sektor. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yaitu: (1) pengkajian kebijakan luncuran kegiatan dengan memperhatikan kebijakan yang lain (penentuan kegiatan prioritas, penentuan besaran anggaran dan waktu pengalokasian); (2) penyediaan dana sharing untuk membiayai persiapan kegiatan; (3) konsisten dalam menggunakan indikator proporsionalitas keserasian untuk menetapkan besaran alokasi anggaran bantuan sarana prasarana; (4) koordinasi dalam penentuan kebijakan proporsi sumber usulan kegiatan berdasarkan urgensitasnya terhadap penyelesaian permasalahan di Kabupaten/Kota serta prioritas terhadap pencapaian program-program strategis daerah, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar sektor; (5) pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten/Kota pengelola kegiatan; (6) serta peningkatan komunikasi bersama dengan sumber-sumber usulan dalam pemerataan alokasi anggaran melalui rapat koordinasi terkait besaran dan sasaran lokasi kegiatan.

Kata kunci : integrasi pembangunan, integrasi vertikal, integrasi strategis

ABSTRACT

Implementation of integrated development is an effort to realize good governance, as well as necessary in the implementation of regional development. Through the integration of development, program/activities can be arranged with precise and can be implemented through integration between policies, as well as to fulfill the expectations, both the expectations from provincial government also from the people in each regency/municipality through the integration of spatial hierarchy. The integration of the spatial hierarchy aspects has different challenges when viewed from the implementation of regional autonomy because there are 35 Regional Head with problems of different regions. One tool that integrates development through the implementation of the Financial Aid to regency/city financed from the budget of Central Java Province. The limited financial capacity, resulting allocation should consider the priorities through the Musrenbang process. Nonetheless, the activities that had not done by Regency/Municipality, indicating the lack of synchronization between the priority activities defined by the needs of the Regency/City. From the explanation, the research aimed to assess the level of integration between Central Java Province development to the needs of the Regency/City through the implementation of the Financial Aid to Regency/City field of infrastructure.

The study was conducted using quantitative research methods using secondary data as well as desk analysis technique and quadrant diagram. Based on the analysis results, the development integration level in Central Java Province through the implementation of the Financial Aid to Regency/City field infrastructure is still low, influenced by the policies of the activities, the availability of funds sharing, consistent use of the indicator calculation proportionality harmony, the source of the proposal, the proportion of proposals, number and capacity of human resources, equalization budget allocation policies and mechanisms for determining activities. Seeing these findings, regional integration factors that contribute is a policy synchronization (vertical integration) and the implementation of the action (horizontal integration). Meanwhile, an organizational integration factors that contribute are the implementation time and budget allocation (strategic integration, adequate human resources (operational integration), coordination and communication and mutual understanding (integration of stakeholders), while sectoral integration factor that contributes is the balance of power among sectors. Based on these factors, there are some things that need to be done to improve the development integration in Central Java Province through the Financial Aid to Regency/City: (1) reviewing the activities policy with considering the others (the determination of priority activities, determining the amount of the budget and time allocation); (2) the provision of funds sharing to finance the activity preparation; (3) consistent in using harmony proportionality indicators to determine the amount of budget allocations for infrastructure assistance; (4) coordination in proportion policy decisions of the proposed activities based on its urgency on solving problems in Regency/City and priority to the achievement of regional strategic programs, to maintain a balance of power between sectors; (5) the development of human resource capacity at Regency/City local agency activities manager; (6) as well as communication improvement with resources in the equalization proposed budget allocations through coordination meetings related to the magnitude and location of the target activity.

Keywords: *integration of development, vertical integration, strategic integration*

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDA ASHIDY
NIM : 21040115410033
Jurusan/Program Studi : MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
Departemen : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas : TEKNIK
Jenis Karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

INTEGRASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH: KAJIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA MELALUI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 12 Februari 2017

Yang menyatakan



HANDA ASHIDY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Integrasi Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah: Kajian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah” dengan tepat waktu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan memberikan beragam masukan yang sangat membantu proses kelancaran penyelesaian tesis ini. Pun juga, kami ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Besar harapan kami agar tesis ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai integrasi pembangunan pada umumnya serta mengenai seberapa besar peran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dalam mewujudkan integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah pada khususnya. Walaupun kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun tidak memupuskan harapan kami akan kemanfaatan hasil tesis ini bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, kami masih berharap adanya perbaikan atas tesis yang telah kami buat di masa yang akan datang, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam tesis ini.

Sekian yang dapat kami sampaikan, sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami haturkan terima kasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Sasaran Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial.....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Keaslian Penelitian	8
1.7 Kerangka Pemikiran	10
1.8 Metodologi Penelitian.....	11
1.8.1 Metode Penelitian	11
1.8.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data	11
1.8.2.1 Data	11
1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data	11
1.8.3 Populasi Penelitian.....	12
1.8.4 Kebutuhan Data Penelitian	13
1.8.5 Pengolahan dan Teknik Analisis Data.....	13
1.8.5.1 Pengolahan Data.....	13
1.8.5.2 Teknik Analisis Data	16
1.9 Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN LITERATUR INTEGRASI PEMBANGUNAN	
 ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA	21
2.1 <i>Good Governance</i>	21
2.2 Integrasi Pembangunan Daerah	23
2.2.1 Integrasi Wilayah	23
2.2.2 Integrasi Organisasional.....	24
2.2.3 Integrasi Sektoral/Lembaga	25

2.3	Implementasi Integrasi Pembangunan di Indonesia	26
2.3.1	Permasalahan Umum Pembangunan Daerah	26
2.3.2	Upaya Perwujudan Integrasi Strategis dan Integrasi Vertikal di Indonesia Melalui Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.....	27
2.3.3	Upaya Perwujudan Integrasi Strategis dan Integrasi Vertikal di Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.....	29
2.4	Sintesis Literatur	31

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA 38

3.1	Profil Wilayah Provinsi Jawa Tengah	38
3.2	Profil Ekonomi.....	38
3.3	Proses Perencanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	42
3.4	Sebaran Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	45
3.5	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2011 s/d 2015 di Provinsi Jawa Tengah.....	47
3.5.1	Realisasi Pencairan Dana, Fisik dan Keuangan.....	47
3.5.2	Kegiatan yang Tidak Selesai/Tidak Dapat Dilaksanakan.....	49

BAB IV INTEGRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN/KOTA MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA 53

4.1	Analisis Proses Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	53
4.1.1	Analisis Kegiatan yang Selesai dan Tidak Selesai/Tidak Dapat Dilaksanakan.....	53
4.1.1.1	Teknik Pelaksanaan dan Proses Analisis	54
4.1.1.2	Indikasi Kabupaten/Kota yang Tidak Terintegrasi Melalui Kegiatan yang Tidak Selesai dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan.....	57
4.1.2	Analisis Perencanaan dan Implementasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Alokasi Anggaran	70
4.1.2.1	Teknik Pelaksanaan dan Proses Analisis	70
4.1.2.2	Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan dan Alokasi Anggaran.....	80
4.2	Analisis Kesesuaian/Ketidakesuaian Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	108
4.2.1	Teknik Pelaksanaan dan Proses Analisis.....	108
4.2.2	Kesesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	114
4.3	Analisis Proses Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Kesesuaian Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	135

4.3.1 Analisis Kelompok Integrasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan dan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	135
4.3.1.1 Teknik Pelaksanaan dan Proses Analisis	135
4.3.1.2 Kelompok Integrasi Pembangunan Berdasarkan Proses Pelaksanaan dan Kesesuaian Dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	143
4.3.2 Analisis Aspek Ketidaksesuaian Integrasi Pembangunan Pada Proses Pelaksanaan dan Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	152
4.3.2.1 Teknik Pelaksanaan dan Proses Analisis	152
4.3.2.2 Aspek Variabel yang Mempengaruhi Integrasi Pembangunan Serta Jenis Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	154
4.4 <i>Best Practice</i> Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2011-2015	162
4.4.1 <i>Best Practice</i> Dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang Telah Terintegrasi Dengan Baik.....	162
4.4.2 Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lain	166
BAB V PENUTUP.....	171
5.1 Rangkuman Hasil Analisis	171
5.2 Kesimpulan dan Saran	176
5.2.1 Kesimpulan.....	176
5.2.2 Saran	185
5.3 Rekomendasi.....	185
5.3.1 Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan.....	186
5.3.2 Instrument Monitoring Kesesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	190
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN.....	207

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Keaslian Penelitian	9
TABEL I.2	Instrumen Daftar Koreksi Data.....	14
TABEL I.3	Data Implementasi Alokasi Anggaran dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	14
TABEL I.4	Data Kebijakan Perencanaan Alokasi Anggaran dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	15
TABEL I.5	Tabel Data RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	15
TABEL I.6	Tabel Kerja Waktu Pelaksanaan	15
TABEL I.7	Tabel Kerja Alokasi Anggaran	16
TABEL I.8	Tabel Kerja Persandingan Jenis dan Lokasi Kegiatan Dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	16
TABEL II. 1	Resume Kajian Literatur.....	31
TABEL IV.1	Hasil Analisis Kegiatan Tidak Selesai dan Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2011.....	57
TABEL IV.2	Hasil Analisis Kegiatan Tidak Selesai dan Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2012.....	59
TABEL IV.3	Hasil Analisis Kegiatan Tidak Selesai dan Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2013.....	60
TABEL IV.4	Hasil Analisis Kegiatan Tidak Selesai dan Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2014.....	62
TABEL IV.5	Hasil Analisis Kegiatan Tidak Selesai dan Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2015.....	63
TABEL IV.6	Prosentase Kegiatan Tidak Selesai dan/atau Tidak Dapat Dilaksanakan	69
TABEL IV.7	Coding Ketidakesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	71
TABEL IV.8	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan TA 2011	81
TABEL IV.9	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan TA 2012	82
TABEL IV.10	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan TA 2013	83
TABEL IV.11	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan TA 2014	84
TABEL IV.12	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Waktu Pelaksanaan TA 2015	86
TABEL IV.13	Prosentase Ketidakesesuaian Dari Variabel Waktu Pelaksanaan.....	92
TABEL IV.14	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Alokasi Anggaran TA 2011	93
TABEL IV.15	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Alokasi Anggaran TA 2012	94

TABEL IV.16	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Alokasi Anggaran TA 2013	95
TABEL IV.17	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Alokasi Anggaran TA 2014	96
TABEL IV.18	Hasil Analisis Kesesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Alokasi Anggaran TA 2015	97
TABEL IV.19	Prosentase Ketidaksesuaian Dari Variabel Alokasi Anggaran.....	102
TABEL IV.20	Temuan Dalam Hasil Analisis Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	104
TABEL IV.21	<i>Coding</i> Ketidaksesuaian Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	112
TABEL IV.22	Hasil Analisis Kegiatan Yang Tidak Sesuai Terhadap Prioritas Kebutuhan Kabupaten/Kota TA 2011 s/d 2015.....	115
TABEL IV.23	Hasil Analisis Ketidaksesuaian Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota TA 2011 s/d 2015	127
TABEL IV.24	Prosentase Kegiatan Tidak Sesuai Kebutuhan TA 2011-2015	131
TABEL IV.25	Temuan Dalam Hasil Analisis Kesesuaian Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	133
TABEL IV.26	Penempatan Kabupaten/Kota Dalam Diagram Kuadran.....	137
TABEL IV.27	Kabupaten/Kota yang Sesuai/ Tidak Sesuai Dengan Proses Pelaksanaan dan Prioritas Kebutuhan TA 2011	138
TABEL IV.28	Kabupaten/Kota yang Sesuai/ Tidak Sesuai Dengan Proses Pelaksanaan dan Prioritas Kebutuhan TA 2012	139
TABEL IV.29	Kabupaten/Kota yang Sesuai/ Tidak Sesuai Dengan Proses Pelaksanaan dan Prioritas Kebutuhan TA 2013	140
TABEL IV.30	Kabupaten/Kota yang Sesuai/ Tidak Sesuai Dengan Proses Pelaksanaan dan Prioritas Kebutuhan TA 2014	141
TABEL IV.31	Kabupaten/Kota Yang Sesuai/ Tidak Sesuai Dengan Proses Pelaksanaan Dan Prioritas Kebutuhan TA 2015	142
TABEL IV.32	Posisi Kabupaten/Kota Dalam Diagram Kuadran TA 2011-2015	148
TABEL IV.33	Aspek Ketidaksesuaian Pada Proses Pelaksanaan Kegiatan Per Kabupaten/Kota	153
TABEL IV.34	Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan Rpjpd, Rpjmd dan Rkpd Per Kabupaten/Kota	153
TABEL IV.35	Hasil Analisis Aspek Ketidaksesuaian Pada Proses Pelaksanaan Kegiatan Per Kabupaten/Kota.....	155
TABEL IV.36	Lembaga yang Berperan Dalam Variabel Alokasi Anggaran.....	161

TABEL IV.37	Best Practice Sragen, Sukoharjo dan Kota Pekalongan.....	164
TABEL IV.38	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pada Provinsi Lain di Pulau Jawa	167
TABEL IV.39	Best Practice Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dari Provinsi Lain	168
TABEL V.1	Rangkuman Hasil Analisis Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	172
TABEL V.2	Rangkuman Hasil Analisis Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	173
TABEL V.3	Rangkuman Hasil Analisis Proses Pelaksanaan Kegiatan dan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	174
TABEL V.4	Pihak-Pihak yang Melakukan Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan	188
TABEL V.5	Teknis Pelaksanaan Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan.....	189
TABEL V.6	Bentuk Instrument Monitoring Kesesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota	191

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Populasi Penelitian yang Digunakan.....	12
GAMBAR 1.2	Diagram Proses Analisis Integrasi Pembangunan.....	17
GAMBAR 1.3	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
GAMBAR 2.1	Skema Integrasi Pembangunan Daerah.....	26
GAMBAR 2.2	Skema Keterkaitan Permasalahan Umum Pembangunan Daerah Dengan Integrasi Pembangunan.....	27
GAMBAR 2.3	Implementasi Integrasi Strategis dan Integrasi Vertikal di Indonesia.....	27
GAMBAR 2.4	Skema Alur Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.....	29
GAMBAR 2.5	Implementasi Integrasi Strategis dan Integrasi Vertikal di Jawa Tengah.....	31
GAMBAR 2.6	Hubungan Antara Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Sarana Prasarana Dengan Prioritas Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	36
GAMBAR 3.1	Profil Provinsi Jawa Tengah.....	37
GAMBAR 3.2	Peta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.....	39
GAMBAR 3.3	Peta Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.....	40
GAMBAR 3.4	Diagram Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015.....	42
GAMBAR 3.5	Mekanisme Musrenbang.....	43
GAMBAR 3.6	Perbedaan Musrenbang Tahun 2014 Dengan Tahun Sebelumnya.....	44
GAMBAR 3.7	Diagram Proporsi Bantuan Dalam Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota APBD Prov Jateng TA 2011-2015.....	46
GAMBAR 3.8	Peta Alokasi Bantuan Sarpras TA 2011-2015.....	47
GAMBAR 3.9	Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA 2011-2015 yang Tidak Selesai/Tidak Dapat Dilaksanakan.....	52
GAMBAR 4.1	Alur <i>Desk Analysis</i> Tahap I.....	55
GAMBAR 4.2	Trend Kegiatan Tidak Selesai Dan/Atau Tidak Dapat Dilaksanakan TA 2011-2015.....	66
GAMBAR 4.3	Diagram Kegiatan Tidak Selesai Dan/Atau Tidak Dapat Dilaksanakan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015.....	68
GAMBAR 4.4	Alur <i>Desk Analysis</i> Tahap II.....	77
GAMBAR 4.5	Input Kabupaten/Kota.....	78

GAMBAR 4. 6	Trend Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Dari Variabel Waktu Pelaksanaan TA 2011-2015.....	89
GAMBAR 4. 7	Diagram Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Dari Variabel Waktu Pelaksanaan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015.....	91
GAMBAR 4. 8	Trend Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Dari Variabel Alokasi Anggaran TA 2011-2015.....	100
GAMBAR 4. 9	Diagram Ketidaksesuaian Proses Pelaksanaan Kegiatan Dari Variabel Alokasi Anggaran di 35 Kab/Kota TA 2011-2015.....	101
GAMBAR 4. 10	Interkoneksi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.....	107
GAMBAR 4. 11	Hubungan Tidak Terwujudnya Integrasi Pembangunan.....	108
GAMBAR 4. 12	Hubungan Tidak Terwujudnya Integrasi Vertikal dan Integrasi Strategis.....	110
GAMBAR 4. 13	Alur <i>Desk Analysis</i> Tahap III.....	113
GAMBAR 4. 14	Input Kabupaten/Kota.....	114
GAMBAR 4. 15	Trend Ketidaksesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota TA 2011-2015.....	128
GAMBAR 4. 16	Diagram Ketidaksesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan di 35 Kab/Kota TA 2011-2015.....	130
GAMBAR 4. 17	Pengaruh sinkronisasi Penetapan Kegiatan Dengan Ketentuan Terhadap Integrasi Vertikal dan Strategis.....	134
GAMBAR 4. 18	Diagram Kuadran Analisis Proses Pelaksanaan Kegiatan Serta Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota.....	136
GAMBAR 4. 19	Alur Analisis Menggunakan Diagram Kuadran.....	137
GAMBAR 4. 20	Hasil Analisis Kuadran TA 2011.....	143
GAMBAR 4. 21	Hasil Analisis Kuadran TA 2012.....	144
GAMBAR 4. 22	Hasil Analisis Kuadran TA 2013.....	145
GAMBAR 4. 23	Hasil Analisis Kuadran TA 2014.....	146
GAMBAR 4. 24	Hasil Analisis Kuadran TA 2015.....	147
GAMBAR 4. 25	Integrasi Kebijakan Dalam Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.....	150
GAMBAR 4. 26	Integrasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Integrasi Pembangunan.....	151
GAMBAR 4. 27	Alur <i>Desk Analysis</i> Tahap IV.....	154
GAMBAR 4. 28	Variabel yang Mempengaruhi Integrasi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.....	159
GAMBAR 5.1	Faktor Integrasi Pembangunan yang Mempengaruhi Integrasi Pembangunan di Provinsi	

Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.....	184
--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kebutuhan Data Penelitian
- Lampiran 2 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 3 Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 4 Kepadatan Penduduk Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011-2015 Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 7 Struktur APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015
- Lampiran 8 Sebaran Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bidang Sarana Prasarana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 9 Realisasi Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015 s/d Akhir Bulan Desember
- Lampiran 10 Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011-2015 yang Tidak Selesai/Tidak Dapat Dilaksanakan s/d Akhir Bulan Desember
- Lampiran 11 Kegiatan TA 2011 Yang Tidak Selesai Dan Tidak Dapat Dilaksanakan
- Lampiran 12 Kegiatan TA 2012 Yang Tidak Selesai Dan Tidak Dapat Dilaksanakan
- Lampiran 13 Kegiatan TA 2013 Yang Yang Tidak Selesai Dan Tidak Dapat Dilaksanakan
- Lampiran 14 Kegiatan TA 2014 Yang Tidak Selesai Dan Tidak Dapat Dilaksanakan
- Lampiran 15 Kegiatan TA 2015 Yang Tidak Selesai Dan Tidak Dapat Dilaksanakan
- Lampiran 16 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan TA 2011
- Lampiran 17 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan TA 2012
- Lampiran 18 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan TA 2013
- Lampiran 19 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan TA 2014
- Lampiran 20 Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan TA 2015
- Lampiran 21 Kesesuaian Alokasi Anggaran Kegiatan TA 2011
- Lampiran 22 Kesesuaian Alokasi Anggaran Kegiatan TA 2012
- Lampiran 23 Kesesuaian Alokasi Anggaran Kegiatan TA 2013
- Lampiran 24 Kesesuaian Alokasi Anggaran Kegiatan TA 2014
- Lampiran 25 Kesesuaian Alokasi Anggaran Kegiatan TA 2015